



**BUPATI JEPARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI JEPARA**  
**NOMOR 31 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan di Kabupaten Jepara maka perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal -Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung dan Kawasan Berebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023**



## Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

## Pasal 2

Sistematika Renja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

## Pasal 3

Renja Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 3 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023.



Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 5 September 2022



Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 5 September 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR 31



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2022  
TANGGAL : 5 September 2022

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	DINAS PERHUBUNGAN
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
18	DINAS PERIKANAN
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



NO	PERANGKAT DAERAH
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
23	SEKRETARIAT DAERAH
24	SEKRETARIAT DPRD
25	INSPEKTORAT KABUPATEN
26	KECAMATAN KEDUNG
27	KECAMATAN PECANGAAN
28	KECAMATAN KALINYAMATAN
29	KECAMATAN WELAHAN
30	KECAMATAN MAYONG
31	KECAMATAN NALUMSARI
32	KECAMATAN BATEALIT
33	KECAMATAN TAHUNAN
34	KECAMATAN JEPARA
35	KECAMATAN MLONGGO
36	KECAMATAN PAKIS AJI
37	KECAMATAN BANGSRI
38	KECAMATAN KEMBANG
39	KECAMATAN KELING
40	KECAMATAN DONOROJO
41	KECAMATAN KARIMUNJAWA
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

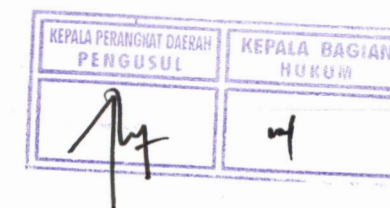
**Tabel 4.1.**

**MATRIK RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023  
BAKESBANGPOL KABUPATEN JEPARA**

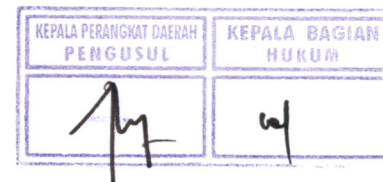
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
8					<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>												
8	1				<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						27,189,557,190			5,426,985,190			
8	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						3,081,915,000			3,141,566,000			
8	1	1	2		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						29,900,000			65,000,000			
8	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	10 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
8	0 1	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	39 Dokumen	10 dokumen	480,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000



8	0 1	0 1	2.0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	10 dokumen	480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
8	0 1	0 1	2.0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 Dokumen	10 dokumen	480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
8	0 1	0 1	2.0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	10 dokumen	480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
8	0 1	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	13 Laporan	10 dokumen	480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000



8	0	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	10 dokumen	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	42,500,000	
8	1	1	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>2,488,892,000</b>				<b>2,500,902,000</b>	
8	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya laporan administrasi keuangan PD		100 %	18 Orang/bul	an12 dokumen	2,387,902,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,387,902,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target	Target	
8	0	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya laporan administrasi keuangan PD	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	112,000,000	



8	0 1	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	an rrusunnya laporan Ter ministrasi keuangan PD ran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 dokumen	990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
8	1	1	2		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>720,000</b>					<b>744,000</b>
8	0 1	0 1	2.0 3	0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada PD	Kab. Jepara, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	6 laporan	720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	744,000
8	1	1	2,1		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>1,000,000</b>					<b>1,000,000</b>
8	0 1	0 1	2.0 5	0 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	2 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
8	1	1	2,1		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>138,993,000</b>					<b>156,870,000</b>
8	0 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 bulan	2,272,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,272,000

8	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 bulan	6,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,000,000
8	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 bulan	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,000,000
8	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
8	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 bulan	10,114,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,121,810
<b>Kode</b>					<b>Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub</b>	<b>Indikator Kinerja</b>			<b>Rencana Tahun 2023</b>					<b>Catatan Penti</b>	<b>Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024</b>		
<b>Capaian Program</b>		<b>Keluaran Sub Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Lokasi Output</b>		<b>Target Capaian Kinerja</b>		<b>Pagu Indikatif</b>	<b>Sumber</b>	<b>Target Capaian Kinerja</b>		<b>Kebutuhan Dana/ Pagu</b>					

Rencana Kerja 2023 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara





					Kegiatan				Kegiatan	Progra m	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an	(Rp.)	Dana ng	Tolok Ukur	Targe t	Indikatif (Rp.)	
8	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000	
8	0	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	12 bulan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,976,190	
8	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 Laporan	12 bulan	86,317,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	102,500,000	
8	1	1	2,1		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>30,360,000</b>				<b>25,000,000</b>

Rencana Kerja 2023 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara



8	0	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Unit		20,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0
8	0	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Demaan	100 %	2 Unit		9,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	25,000,000
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,1</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>341,750,000</b>				<b>341,750,000</b>	
8	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun		100 %	8 Laporan	3 laporan	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
8	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	jumlah laporan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun		100 %	4 Laporan	3 laporan	61,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	61,500,000

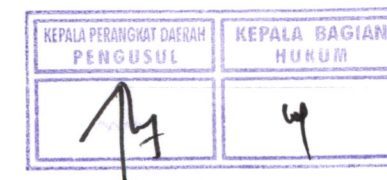


8	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	jumlah laporan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun		100 %	12 Laporan	3 laporan	279,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	279,250,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target	Tipe	
8	1	1	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50,300,000			50,300,000		
8	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD yang tersedia	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	17 Unit	4 laporan	37,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	37,500,000
8	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD yang tersedia	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Unit	4 laporan	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
8	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD yang	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	10 Unit	4 laporan	6,700,000	Dana Transfer Umum-Dana		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,700,000

Rencana Kerja 2023 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara



								tersedian						Alokasi Umum						
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD yang tersedian	Kab. Jepara, Demaan	100 %	4 Unit	4 laporan	5,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,600,000		
8	1	2			<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>							<b>75,000,000</b>							<b>100,000,000</b>	
8	1	2	2		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>							<b>75,000,000</b>								<b>100,000,000</b>
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,17 %	2085 Orang	3 laporan	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	0,17 %	100,000,000		
8	1	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>							<b>21,871,669,190</b>							<b>1,884,669,190</b>	
8	01	03	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>							<b>21,871,669,190</b>								<b>1,884,669,190</b>



8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.09 %	35 Orang	4 laporan	21,871,669,190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	0.09 %	1,884,669,190
8	1	4			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>								1,845,000,000		1,000,000		
8	1	4	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat								1,845,000,000		1,000,000		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pembayaran dan pengawasan organisasi masyarakat yang tersusun		25 %	50 Orang	2 laporan	1,844,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	25 %	0

Rencana Kerja 2023 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara



8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pembayaran dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang tersusun		25 %	2 Laporan	2 laporan	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	25 %	1,000,000
8	1	5			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>								104,673,000				104,750,000	
8	1	5	2		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>								104,673,000				104,750,000	
8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Cakupan penyuluhan P4GN pada pelajar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	4500 Orang	10 laporan	104,673,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyuluhan P4GN pada pelajar	15 %	104,750,000
8	1	6			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>								211,300,000				195,000,000	
8	1	6	2		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>								211,300,000				195,000,000	



8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Keberhasilan dalam pencegahan konflik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	berhasil opini	70 Orang	4 laporan	58,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keberhasilan dalam pencegahan konflik	berhasil opini	108,000,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Keberhasilan dalam pencegahan konflik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	berhasil opini	24 Laporan	4 laporan	37,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keberhasilan dalam pencegahan konflik	berhasil opini	37,000,000	

Rencana Kerja 2023 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara



8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Keberhasilan dalam pencegahan konflik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	berhasil opini	2 Dokumen	4 laporan	116,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keberhasilan dalam pencegahan konflik	berhasil opini	50,000,000
<b>TOTAL</b>													<b>27,189,557,190</b>		<b>5,426,985,190</b>		





**RENJA**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN JEPARA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
2022**

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, Rencana Kerja ( Renja ) Tahun Anggaran 2023 yang merupakan rencana kerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara telah tersusun. Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 adalah dokumen perencanaan untuk 1 priode tahun anggaran , yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja ( Rencana Kerja ) Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Penyusunan Renja anggaran Tahun 2021 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023, yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan RENSTRA - PD 2023 - 2026 .

Demikian Rencana Kerja Tahun anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan Renja tahun anggaran 2023 ini. Semoga Renja ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi Pimpinan dan seluruh staf pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun mendatang.

Jepara, Juli 2022  
KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN JEPARA  
  
**JUKITO SUDI ASMARA, SH, M, SI**  
Pembina Utama Muda

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021</b> .....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan capaian Renstra PD	5
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan .....	8
2.3. Isu Isu Strategis PD.....	13
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD</b> .....	15
3.1. Tujuan dan Sasaran PD.....	15
3.2. Penjelasan / Program/ Kegiatan.....	20
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b> .....	22
4.1. Menyajikan Pendanaan Program dan Kegiatan PD .....	23
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	32
5.1. Kesimpulan .....	32



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan PD, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis PD. Renja- PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra - PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja -PD), Pada tahun 2023 masa RPJMD Kabupaten Jepara priode 2017 – 2022 sudah habis masanya, oleh karena itu masa pertama dalam penyusunan RENJA PD Kesbangpol Jepara berpedoman pada RENSTRA PD 2023 – 2026 dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan rencana tahunan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah ( PD ).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang di Kabupaten Jepara . Pada satu sisi, perkembangan tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat bermanfaat bagi

---

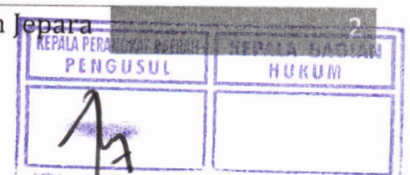
Rencana Kerja 2023 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara



2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

---

Rencana Kerja 2023 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara





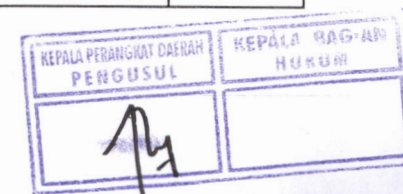
		Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah bantuan hibah partai politik yang diterima			12 partai politik	10 kali monitoring dan evaluasi penunjang banpol, 11 kali penerima bantuan hibah banpol				
80104		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat yang dilatih menjaga ketenteraman umum</b>	100%	100%	100%	100	100	100	100	100%
8E+07	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									
8E+09	1.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah rapat pendaftaran ormas jumlah pembinaan ormas jumlah fasilitasi keg ormas jumlah anggota ormas yang dikirim jumlah pemantauan ormas			12 kali 3 kali 4 kali 30 orang 30 kali pemantauan ormas	14 kali rapat pendaftaran ormas, 5 kali pembinaan ormas, 11 kali fasilitasi kegiatan ormas, 0 ormas yang dikirim ,30 kali	94,48%			

Rencana Kerja 2023 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara



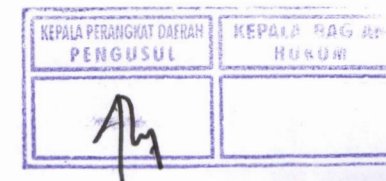
							pemantauan ormas				
80105	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Kasus kriminalitas	503 Kasus	251 Kasus	593 Kasus	43 kasus	100%	503 kasus	503 kasus	100%
			Jumlah kasus narkoba	7 Kasus	29 Kasus	10 Kasus					
80105201	1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya									
8010520104	1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah pelaksanaan sosialisasi peningkatan pemahaman bahaya Narkoba jumlah sarasehan penghayat			14 kali 2 kali	18 kali pelaksanaan sosialisasi peningkatan pemahaman bahaya Narkoba, 3 kali sarasehan penghayat	131,25%			
80106	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI		Kasus kriminalitas	503 Kasus	251 Kasus	593 Kasus	0	0			

Rencana Kerja 2023 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara





	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL										
			Persentase lembaga masyarakat yang dilatih menjaga ketenteraman umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8E+07	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									
8010620104	1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	jumlah fasilitasi FKDM jumlah Rakor TIM PGK Jumlah Pelaksanaan Apel 3 Pilar Desa Jumlah rakor tim satabilitas daerah jumlah sarasehan dengan forkopimda jumlah peserta sosialisasi tentang penanganan konflik sosial			8 kali 3 kali 3 kali 88 kali 3 kali 200 orang	8 kali fasilitasi FKDM, 3 kali apel 3 pilar, 100 orang sosialisasi konflik sosial, 3 kali rakor PGK, 88 kali rakor tim stabilitas daerah, 1 kali sarasehan dengan forkopimda			80,56%	



		Konflik di Daerah									
8010620105	1.2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini kerjasama intelijen ,pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konf	Jumlah rakor Tim wasdinda Jumlah Pelaksanaan FGD Jumlah monitoring dan pengawasan warga negara asing Jumlah rakor tim warga negara asing Jumlah pemantauan wilayah Jumlah rakor pemantauan wilayah			6 kali 1 kali 25 kali 3 kali 60 kali 24 kali	6 kali rakor tim wasdinda , 1 kali FGD, 25 kali Pemantauan WNA, 3 kali Rakor WNA, 60 kali pemantauan wilayah 24 kali rakor pemantauan wilayah	114,17			
x	Semua Urusan										
xxx	Semua Urusan										
80101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Serapan Anggaran	100%	100%	100%	95%	95%	100%	100%	100%
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
80101201	1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang tersusun			3 dokumen	3 dokumen	100%			

Rencana Kerja 2023 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara



8010120101	1.1	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan yang tersusun			3 dokumen	3 dokumen	100%			
8010120105	1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah FGD evaluasi kinerja			2 kali	100%	100%	100%	100%	100%
80101202	2	Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penerimaan gaji dan tambahan			12 bulan	6	100%	100%	100%	100%
8010120201	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penerimaan gaji dan tambahan penghasilan			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%
8010120202	2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%
80101203	3	Administrasi Umum						100%	100%	100%	100%
8E+09	3.1	Penyedia Alat Tulis dan Kantor	jumlah bulan penyedia alat tulis dan kantor			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%
8010120313	3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis dan kantor			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%

Rencana Kerja 2023 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara



								100%	100%	100%
8010120316	3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%
8010120302	3.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%
8010120306	3.5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%
8010120309	3.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%
8010120311	3.7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%
8010120314	3.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%
8010120318	3.9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah bulan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%
8010120328	3.10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%
8010120330	3.11	Pemeliharaan	jumlah bulan			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%

Rencana Kerja 2023 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara



		Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional								
8010120301	3.12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%
80101204	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%
8010120402	4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%
8010120403	4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%
80101205	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%
8010120501	5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%

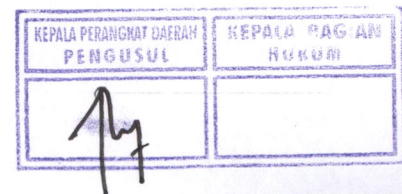


			jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			12 bulan						100%
8010120502	5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			12 bulan	12 bulan					100%
8010120503	5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor			12 bulan	12 bulan					100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Program (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kegiatan (Tahun 2021)			Target Renja Program dan Kegiatan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Berjalan 2022	
					Target Kinerja (Tahun 2020)	Realisasi 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Program (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja dan Realisasi Program dan Kegiatan (Tahun 2021)			Target Renja Program dan Kegiatan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Berjalan 2022	
					Target Kinerja (Tahun 2020)	Realisasi 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10504	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	vPersentase lembaga masyarakat yang dilatih menjaga ketenteraman umum	100%	100%	100%	100%	100	100%	



10504001	1	monitoring dan pemantauan kegiatan ormas	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	termonitoring masyarakat	3 kali rapat, 3 kali monitoring	13.00 kali monitoring, 15.00 kali rapat	433.33% (kali monitoring), 500% (kali rapat)	30 kali	30kali	100%
10504002	2	pemutakhiran data ormas		Terdatanya keberadaan ormas secara menyeluruh	100 Folder Buku Ormas, 5 kali rapat penelitian	30.00 folder buku, 13.00 kali rapat penelitian	30% (folder buku), 260% (kali rapat penelitian)			
10504003	3	Sosialisasi dan Pembinaan Ormas		terlaksananya pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan	4 pembinaan ormas, 350 orang	175.00 orang, 3.00 kali pembinaan ormas	4375% (orang), 0.86% (kali pembinaan ormas)			
10504005	4	pengiriman peserta pelatihan ormas		terkirimnya anggota ormas	65 orang peserta	27.00 orang	41.54% (orang)	30 orang		0





10504006	5	fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat	Meningkatnya peran FKDM  Terfasilitasinya FKUB  Terselenggaranya Kegiatan Forum FPBI  jumlah fasilitasi
10504008	6	FASILITASI FKUB	
10504009	7	FASILITASI FPBI	
10504010	8	Fasilitasi Kegiatan Ormas	

6 kali rapat Tim FKDM, 1 kali bintek, 1 kali rakor FKDM Kecamatan	6.00 kali Rakor Tim FKDM, 1.00 kali bintek	100% (orang), 100% (kali Rakor Tim FKDM)			
12 bulan	12.00 bulan	100% (bulan)	0	0	
12 bulan	12.00 bulan	100% (bulan)	0	0	Masa Berlaku SK Pembentukan Ormas FPBI masih dalam proses
30 fasilitasi	7.00 fasilitais	23.33% (fasilitais)	4 kali	4 kali	100%



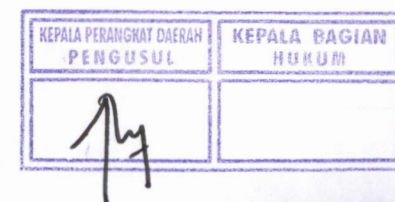
10505	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Pencegahan Tindak Kriminal		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	vKasus Kriminalitas	503 Kasus	697 Kasus	200 Kasus	559,27%	593 kasus	503 kaus	503 kasus
10505003	1	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat		Terpantaunya aktifitas aliran kepercayaan Masyarakat		2 kali Rapat Tim Pakem , 2 kali pembinaan , 80 orang sarasehan /pembinaan	80.00 orang sarsehan ,2.00 kali rapat tim pakem ,2.00 kali pembinaan	4000% (orang sarsehan ), 100% (kali rapat tim pakem ), 2.5% (kali pembinaan )			



10505004	2	Pemantauan dan cipta kondisi wilayah		Terlaksananya Penataan Wilayah	120 Kali pemantauan wilayah, 24 Kali rapat koordinasi tim pemantauan wilayah, 5 Kali rapat tim wasdinda, 1 Kali FGD	130.00 Kali pemantauan wilayah ,41.00 Kali rapat koordinasi tim pemantauan wilayah ,6.00 Kali rapat Tim Wasdinda,1.00 kali FGD	108.33% (Kali pemantauan wilayah ), 170.83% (Kali rapat koordinasi tim pemantauan wilayah ), 120% (Kali rapat Tim Wasdinda), 100% (kali FGD)	60 kali pemantauan wilayah , 4 kali rakor wasdinda , 24 kali rakor pemantauan wilayah	60 kali pemantauan wilayah , 3 kali rakor wasdinda, 20 kali rakor pemantauan wilayah	
10505005	3	Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan (PGK)		Meningkatnya Peran PGK dalam rangka menjaga kondusifitas Daerah	1 kali rakor tim penanganan gangguan keamanan/penanganan konflik sosial, 3 kali rapat sekretariat tim terpadu penanganan konflik sosial	1.00 kali rakor tim penanganan gangguan keamanan	100% (kali rakor tim penanganan gangguan keamanan )	3 kali	0	0



10505006	4	Sosialisasi UU. No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial		Meningkatnya Stabilitas Daerah terhadap Konflik Sosial Masyarakat		1 kali rapat tim sosialisasi UU No. 7 tahun 2012, 2 Kali sosialisasi , 200 orang	1.00 kali rapat tim sosialisasi UU No. 7 tahun 2012, 2.00 kali sosialisasi, 150.00 orang	100% ( kali rapat tim sosialisasi UU No. 7 tahun 2012), 100% (kali sosialisasi), 75% (orang )	200 orang	200 Orang	100%
10505007	5	pengawasan dan monitoring orang asing		Terpantaunya Aktifitas orang asing		2 kali rakor tim pora, 1 kali rakor/sarasehan pengawasan WNA dengan masyarakat, RT, RW , 100 orang , 25 kali pengawasan WNA	2.00 kali rakor tim pora, 1.00 kali rakor/sarasehan pengawasan WNA dengan masyarakat, RT, RW , 40.00 orang , 25.00 pemantaun WNA	100% (kali rakor tim pora), 100% (kali rakor/sarasehan pengawasan WNA dengan masyarakat), 40% ( RT), 100% ( RW )	25 kali pemantauan WNA , 3 kali rakor WNA	25 kali pemantauan WNA, 3 kali Rakor WNA	



10505009	6	fasilitasi posko ketentraman dan stabilitas daerah	Terfasilitasinya Tim Stabilitas Daerah		1 kali jagongan/sarasehan, 7 bulan operasional tim koordinasi upaya stabilitas daerah	1.00 kali jagongan/sarasehan, 7.00 bulan	100% (kali jagongan/sarasehan), 100% (bulan)	88 kali		
10508	Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba		vJumlah kasus narkoba	7 Kasus	11 Kasus	47 Kasus	427.27 Kasus	10 kasus	38 kasus	-26%
10508001	1	sosialisasi P4GN dan peringatan HANI	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Khususnya Generasi Muda Tentang bahaya Narkoba		2 kali rapat Tim pelaksanaan, 2 kali sosialisasi P4GN, 110 orang	4.00 kali rapat Tim pelaksanaan, 5.00 kali sosialisasi P4GN, 157.00 orang	200% (kali rapat Tim pelaksanaan), 250% (kali sosialisasi P4GN), 142.73% (orang)	14 kali sosialisasi P4GN	14 kali sosialisasi P4GN	100%



10509	Program Pendidikan Politik Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	vPersentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	80%							
10509001	1	monitoring dan evaluasi penunjang bantuan parpol	Keakuratan Laporan Pertanggung Jawaban Banpol	100%		10.00 kali rapat tim monev	10% (monitoring )	59 kali	8 kali		
10509002	2	pendidikan politik bagi masyarakat	Terlaksananya Pendidikan politik pada masyarakat		3 kali sosialisasi, 110 orang	150.00 orang ,3.00 kali sosialisasi	5000% (orang ), 2.73% ( kali sosialisasi)	300 orang	300 orang		100%
10509003	3	sosialisasi pelatihan LPJ Banpol	Terseleenggaranya Pelatihan LPJ Banpol		2 Kali Sosialisasi , 20 Orang	2.00 kali sosialisasi,12.00 orang	100% (kali sosialisasi), 60% (orang )	40 orang	40 orang		100%
40513001	1	Hibah Bantuan Keuangan untuk Partai Politik	Jumlah penerima bantuan untuk parpol		12 parpol	8.00 kegiatan	66.67% (kegiatan)	12 parpol	8 kegiatan		66, 67 %



10510	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	vPersentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan	0,12 %	0,12 %	0,10 %	83%	0,12 %	0,10 %	83%
10510004	1	Pelestarian nilai - nilai kepahlawanan		Meningkatnya Nilai Nilai Kepahlawanan dan keperintisan kepada siswa sekolah		1 Kali Sarasehan , 110 Orang siswa siswi Sekolah	50.00 orang ,1.00 kali sosialisasi	5000% (orang ), 0.91% (kali sosialisasi)			
10510005	2	Bina bangsa		Meningkatnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air kepada generasi muda elemen masyarakat		2 Kali seminar , 215 Orang pelajar , 2800 peserta safari kebangsaan	3.00 kali seminar ,215.00 orang seminar ,800.00 peserta safari kebangsaan	150% (kali seminar ), 100% (orang seminar ), 28.57% (peserta safari kebangsaan )	1116 orang	1116 orang	100 %



10510006	3	pendidikan wawasan kebangsaan		Meningkatnya wawasan kebangsaan		1 Kali kegiatan wawasan kebangsaan , 170 Orang	2.00 Kali kegiatan wawasan kebangsaan ,85.00 orang	200% ( Kali kegiatan wawasan kebangsaan ), 50% (orang )	100 orang	100 orang	100%
10510008	4	penyelenggaraan PPBN		Meningkatnya kesadaran bela negara dan cinta tanah air		1 Kali rapat Tim panitia , 1 Kali penyelenggaraan bela negara , 60 orang	2.00 kali penyelenggaraan,100.00 orang,1.00 kali rapat tim panitia	200% (kali penyelenggaraan), 10000% (orang), 1.67% (kali rapat tim panitia )			
10510008	5	Forum Komunikasi Antara Pemerintah dengan Masyarakat		Terjalinya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dengan baik		1 forkom tk kabupaten , 140 orang , 4 kali forkom tk kecamatan , 60 orang	0.00 forkom tk kabupaten ,0.00 orang ,1.00 kali forkom tk kecamatan ,50.00 orang	0% (forkom tk kabupaten ), 0% (orang ), 25% (kali forkom tk kecamatan ), 83.33% (orang )	0	0	0





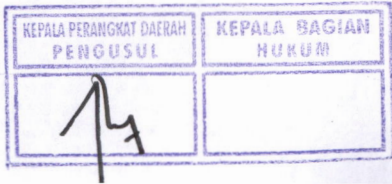
		Gerakan Nasional Refolusi mental		jumlah peserta		0	0	0	200 orang	200 orang	100%
10510009	6	festival gebyar kebangsaan		Jumlah festival gebyar kebangsaan yang terselenggara		1 Kali kegiatan,	1.00 kegiatan	100% (kegiatan )	0	0	0
<b>4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
<b>405 Fungsi lain</b>											
40523		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	vPersentase Pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40523025	1	Pelayanan Teknis Kantor		Terpenuhinya kebutuhan teknis kantor 12 bulan		12 bulan	12.00 bulan	100% (bulan )	12 bulan	12 bulan	12 bulan
40526		Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	vPersentase Serapan Anggaran	100,00 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %



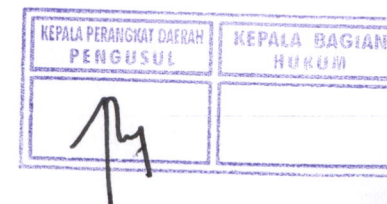
40526033	1	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi	Laporan POK, LKPJ, LPPD, RKA/DPA, Evaluasi RPJMD, Musrenbangca m, Forum OPD	7 jumlah pelaporan tersusun	7 jumlah pelaporan tersusun	100% (Laporan tersusun )	100%	100%	100 %
80101201	1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang tersusun				3 dokuemn	3 dokumen	100 %
8010120101	1	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan yang tersusun				3 dokumen	3 dokumen	100 %
8010120105	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah FGD evaluasi kinerja				2 FGD	2 FGD	100%
80101202	2	Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penerimaan gaji dan tambahan				12 bulan	12bulan	100 %
8010120201	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penerimaan gaji dan tambahan penghasilan				12 bulan	12bulan	100 %
8010120202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				12 bulan	12bulan	100 %
80101203	3	Administrasi Umum					12 bulan	12bulan	100 %
8010120310	3	Penyedia Alat Tulis dan Kantor	jumlah bulan penyedia alat tulis dan kantor						



8010120313	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					12 bulan	12bulan	100 %
8010120316	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor					12 bulan	12bulan	100 %
8010120302	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12 bulan	12bulan	100 %
8010120306	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional							
8010120309	4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja					12 bulan	12bulan	100 %
8010120311	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan					12 bulan	12bulan	100 %
8010120314	4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga					12 bulan	12bulan	100 %
8010120318	4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					12 bulan	12bulan	100 %



8010120328	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor							
8010120330	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional							
8010120301	3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat					12 bulan	12 bulan	100 %
80101204	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat					12 bulan	12bulan	100 %
8010120402	4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat					12 bulan	12bulan	100 %
8010120403	4	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik					12 bulan	12bulan	100 %
80101205	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		jumlah bulan pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya					12 bulan	12bulan	100 %
									12 bulan	12bulan	100%



8010120501	5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional							%
			jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					12 bulan	12bulan	100 %
8010120502	5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja					12 bulan	12bulan	100 %
8010120503	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor					12 bulan	12bulan	100 %

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

**2.1.1. Realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang di rencanakan**

Dari lima (5) Program PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara ada satu ( 1 ) Program yang tidak memenuhi target kinerja dapat dilihat dengan tabel dibawah ini :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RPJ MD pada Tahun 2017 s/d 2022 (Akhir Periode RPJ MD)	Realisasi Capaian RPJMD s/d RKPD Tahun (2020 )	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Dievaluasi	Tingkat Realisasi 2021 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Unsur Pemerintahan									
801	Kesatuan Bangsa dan Politik									
80105	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah kasus narkoba	7 Kasus	29 Kasus	10 Kasus	43 kasus	23%	7 kasus	7 kasus	100%





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Unsur Pemerintahan										
801	Kesatuan Bangsa dan Politik										
80102	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan	0,12 %	0,10 %	0,12%	0.17 %	141,67%	0,12%	0,12 %	100%	
80102201	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									
8010220103	1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta pelaksanaan kegiatan bina bangsa safari kebangsaan Bupati di SMA/SMK/MA Jumlah peserta gerakan nasional revolusi mental Jumlah peserta pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan bagi			1116 orang	1750 orang peserta safari kebangsaan, 235 orang peserta gerakan nasional revolusi mental, 100 orang peserta pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan	147,24	1416 orang	1416 orang	100%

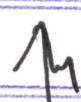




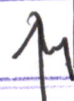
			ASN/Non ASN				bagi ASN/Non ASN				
80103		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	80,00%			0	0	tidak ada pemilu	tidak ada pemilu	tidak ada pemilu
80103201	1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan									
8E+09	1.1	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	jumlah peserta pendidikan politik jumlah peserta pelatihan LPJ banpol Jumlah monitoring dan			300 orang 40 orang 4 kali	418 orang peserta pendidikan politik, 28 orang peserta yang menguk	131,17			100%

KEPALA BERANGKAT DAERAH PENGUSUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
100% 100%

		Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	evaluasi penunjang bantuan parpol Jumlah bantuan hibah partai politik yang diterima			12 partai politik	uti LPJ Banpol, 10 kali monitoring dan evaluasi penunjang banpol, 11 kali penerimaan bantuan hibah banpol				
80104		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat yang dilatih menjaga ketenteraman umum</b>	100 %	100%	100%	100	100	100	100	100%
8E+07	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									
8E+09	1.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah rapat pendaftaran ormas jumlah pembinaan ormas jumlah fasilitasi keg ormas jumlah anggota ormas yang dikirim  jumlah pemantauan ormas			12 kali 3 kali 4 kali 30 orang 30 kali pemantauan ormas	14 kali rapat pendaftaran ormas, 5 kali pembinaan ormas, 11 kali fasilitasi kegiatan ormas, 0 ormas yang dikirim, 30 kali	94,48%			

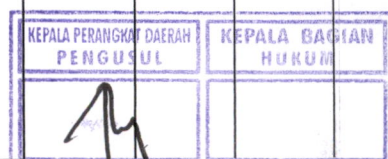
KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN
	

							peman tau n ormas				
80106		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kasus kriminalita s	503 Kasu s	251 Kasu s	593 Kasus	0	0			
		Persentase lembaga masyaraka t yang dilatih menjaga ketentera man umum	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8E+07	1	Perumusa n Kebijakan Teknis dan Pelaksanaa n Pemantap an Kewaspad aan Nasional dan Penangana n Konflik Sosial									
801062 0104	1. 1	Pelaksanaa n Koordinasi di Bidang Kewaspad aan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantau an Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspad aan Perbatas an Antar Negara, Fasilitasi Kelembaga an Bidang Kewaspad	jumlah fasilitasi FKDM jumlah Rakor TIM PGK Jumlah Pelaksanaa n Apel 3 Pilar Desa Jumlah rakor tim satabilitas daerah jumlah sarasehan dengan forkopimda jumlah peserta sosialisasi tentang penangana n konflik sosial			8 kali  3 kali  3 kali  88 kali  3 kali  200 orang	8 kali fasilitasi FKDM,3 kali apel 3 pilar, 100 orang sosialis asi konflik sosial, 3 kali rakor PGK, 88 kali rakor tim stabilita s daerah , 1 kali saraseh an	80,5 6%			

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Unsur Pemerintahan									
801	Kesatuan Bangsa dan Politik									
80102	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan	0,12 %	0,10 %	0,12%	0,17 %	141,67%	0,12%	0,12 %	100%
80102201	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantauan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								
8010220103	1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta pelaksanaan kegiatan bina bangsa safari kebangsaan Bupati di SMA/SMK/MA Jumlah peserta gerakan nasional revolusi mental Jumlah peserta pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan bagi ASN/Non			1116 orang  200 orang  100 orang	1750 orang peserta safari kebangsaan , 235 orang peserta gerakan nasional revolusi mental , 100 orang peserta pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan	147,24	1416 orang	1416 orang  100%



		ASN				aan bagi ASN/No n ASN			
--	--	-----	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

**2.1.4. Faktor Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan**

**A. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja**

1. Rendahnya pelatihan perencanaan di Perangkat Daerah
2. Perencanaan tidak memahami kondisi dan situasi yang berjalan
3. Singkatnya waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan sehingga dalam penentuan indikator kinerja tidak sesuai kondisi yang ada
4. Data awal dalam penentuan indikator kinerja tidak jelas sehingga berpengaruh terhadap pelaporan capaian kinerja .

**B. Faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja**

1. Inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang biasa nya tatap muka dengan peserta terbatas , adanya menggunakan daring ( aplikasi ZOOM ) dengan terget peserta melebihi rencana yang sudah di rencanakan.
2. Kerjasama dengan dinas instansi lain yang program dan kegiatan sama dengan target kinerja nya yaitu Kesbangpol Provinsi Jateng .

**2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra PD**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara yaitu menangani di urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 5 program kegiatan penunjang RPJMD apabila capaian program tidak terlaksanakan dengan baik akan berdampak kepada masyarakat yaitu :

1. Rendahnya masyarakat terhadap cinta tanah air dan bangsa.
2. Tingginya Kriminalitas yang di sebabkan kasus kejahatan narkoba.
3. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada bangsa dan negara sehingga terjadi konflik horisontal dan vertikal ( Unjuk Rasa Ipoleksosbud)



### **2.1.6. Kebijakan / tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut**

1. Peningkatan SDM di bidang perencanaan melalui pelatihan atau sejenisnya
2. Pemanfaatan Teknologi informasi dalam rangka untuk menunjang capaian kinerja
3. Pemberian Reward untuk perencana

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jepara tahun 2021 berdasarkan LKJIP 2021 yang sudah disusun menetapkan dua sasaran strategis, dua indikator kinerja. Pelaksanaan program/ kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2021 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 2021 pencapaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 88,47 %. Pencapaian hasil realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jepara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.2

## PENCAPAIAN/TARGET KINERJA PELAYANAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara

No	Indikator Kinerja Utama	SP M/standar nasional	IKK Program	Target Renstra Bakesbangpol				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2018	2019	2020	2021	2020	2021	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah konflik dalam masyarakat yang di sebabkan oleh SARA		Persentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan	0.03%	0,12 %	0.12%	0,12%	0,17 %		0.12%	0,12%	
2	Persentase Ormas, LSM dan OKP mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan		Persentase lembaga masyarakat yang dilatih menjaga ketenteraman umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	
			Kasus Kriminalitas	736 kasus	708 kasusu	697 kasus	593 kasus	503 kasus		697 kasus	593 kasus	
			Jumlah kasus narkoba	29	13	11	10	7 kasus		11	10	
			Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	74 %	74 %	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	80%		Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	





## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

### A. Kinerja Pelayanan OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara merupakan institusi teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta membangun sistem politik yang demokratis guna mewujudkan program pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.

Pada tahun 2023 sesuai dengan Arah kebijakan prioritas pembangunan, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara pada tahun 2023, ditetapkan sasaran-sasaran Program Prioritas sebagai berikut :

- a. Mensukseskan pemilu dan pilkada tahun 2024
- b. Fasilitasi dan pencegahan narkoba dan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan . Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)

Pencapaian Program Prioritas pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara akan melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan.

### B. Permasalahan yang Dihadapi

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Jepara pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara berdasarkan tugas, pokok dan fungsi serta dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 adalah :

#### 1. Bidang Kesatuan Bangsa dan Penanganan Masalah Aktual :

- a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
- b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bersifat anarkis;
- c. Terhitung 2 kasus konflik keagamaan pada masa pandemi terkait kegiatan keagamaan.
- d. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
- e. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;



- f. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;

## **2. Bidang Organisasi dan Politik( Ormaspol ):**

- a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
- b. Masih banyaknya organisasi kemasyarakatan yang belum terdaftar
- c. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional;
- d. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu;
- e. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
- f. Terjadi pengunduran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, karena masa pandemi Covid 19, sehingga Dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020, terdapat 208 Kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2021 mengakibatkan adanya kekosongan Kepala Daerah.

## **C. Tantangan dan Peluang**

Adapun tantangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara antara lain:

- a. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa dan restorasi sosial budaya serta stabilitas Jawa Tengah dalam rangka memantapkan ideologi dan wawsan kebangsaan;
- b. Belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;
- c. Masih terdapat konflik perebutan dalam pengelolaan sumber daya alam (termasuk pesisir) di masyarakat sebagai dampak meningkatnya kegiatan penggalian, pertambangan dan industri;
- d. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat.
- e. Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di masyarakat.

Dari tantangan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara memiliki sejumlah peluang sebagai berikut:

- a. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga eksistensi bangsa melalui peningkatan wawsan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini;
- c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat Jepara, dalam berpolitik saat ini terus tumbuh;

- d. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat;
- e. Stabilitasnya sistem politik Kabupaten Jepara sehingga memberikan ruang bagi pengembangan sistem politik yang demokratis.

#### **D. Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti**

Untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Jepara tersebut diperlukan solusi atau rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Melakukan kegiatan Safari Kebangsaan di Lingkungan Sekolah Khusus nya SMA/SMK
3. Memberikan pemahaman akan pentingnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
4. Peningkatan penggunaan Media Sosial dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila; partisipasi politik dan Wawasan Kebangsaan;
5. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait agar tidak terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.
6. Melakukan sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat;
7. Melakukan pembinaan kepada penerima bantuan keuangan partai politik
8. Koordinasi dan kerjasama antara Badan Penyelenggara Pemilu dan aparat terkait dalam rangka antisipasi isu negatif yang berkembang;
9. Perlu tindakan tegas terhadap pelaku dugaan money politic;
10. Koordinasi antara Badan Penyelenggara Pemilu dan instansi terkait mengenai jumlah DPT.
11. Pemerintah perlu menyediakan tempat bagi masyarakat untuk dapat berekspresi dengan bebas dan tertib tanpa mengganggu kenyamanan pihak lain;
12. Lebih memperhatikan fasilitas bagi kelompok disabilitas dan lansia
13. Kaderisasi yang baik dalam partai-partai politik sehingga dapat menghasilkan politisi-politisi yang berintegritas dan kompeten;
14. Koordinasi bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, FKUB dan Ormas Keagamaan dalam menciptakan sikap toleransi menghadapi pandemi Covid-19 dan mensukseskan Pemilu Serentak 2024
15. Melakukan sinergitas dalam Penanganan Konflik Sosial dan Peningkatan Deteksi Dini dengan aparat keamanan seiring meningkatnya gangguan kamtibmas pada masa pandemi Covid-19.

16. Melakukan sinergitas peran fungsi TIM Wasdinda dan WNA dalam rangka menjaga keamanan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024
17. Peningkatan SDM Aparatur di bidang pemantaun dan dinamika politik dalam rangka mensukseskan Pemilu 2024
18. Pembinaan karya seni budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mendukung sukses pemilu 2024
19. Melakukan sosialisasi P4GN

#### **2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Provinsi dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan provinsi.

Berikut Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara :

**Tabel 2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara**

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Jepara	Persentase masyarakat yang mendapatkan wawasan kebangsaan	0,12 %	330,000,000	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Jepara	Persentase masyarakat yang mendapatkan wawasan kebangsaan	0,12 %	330,000,000	
B	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Jepara	Persentase masyarakat yang dilatih menjaga ketenteraman umum	100 %	270,000,000	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Jepara	Persentase masyarakat yang dilatih menjaga ketenteraman umum	100 %	270,000,000	
C	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	Kab. Jepara	Jumlah kasus narkoba	7 kasus	337,000,000	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	Kab. Jepara	Jumlah kasus narkoba	7 kasus	337,000,000	
D	PROGRAM Peningkatan Keaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan	Kab. Jepara	Jumlah kasus kriminalitas	503 kasus	590,000,000	PROGRAM Peningkatan Keaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Kab. Jepara	Jumlah kasus kriminalitas	503 kasus	590,000,000	
E	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	Kab. Jepara	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	80 %	1,723,669,190	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	Kab. Jepara	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	80 %	1,723,669,190	
E	PROGRAM Penunjang	Kab. Jepara	Persentase serapan anggaran	100 %	3,356,782,000	PROGRAM Penunjang Urusan	Kab. Jepara	Persentase serapan anggaran	100 %	3,356,782,000	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan kegiatan masyarakat tahun 2023 , Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada. Berikut Usulan Program/Kegiatan Masyarakat hasil telaah :

**Tabel 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara**

NO 1	PROGRAM/KEGIATAN 2	LOKASI 3	INDIKATOR KINERJA 4	BESARAN/ VOLUME 5	CATATAN 6
A	NIHIL				



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara secara struktural dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada tahun 2023 yang sesuai dengan bidang politik dan pemerintahan umum antara lain :

1. Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
2. Kecenderungan peningkatan konflik sosial; isu ini semakin hangat dimunculkan seiring dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa.
3. Terorisme dan radikalisme; banyaknya warga negara indonesia yang teridentifikasi bergabung dengan kelompok terorisme seperti ISIS
4. Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi
5. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia sekarang bukan lagi merupakan negara transit narkoba tetapi merupakan negara pemakai.
6. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan; seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, orang semakin luntur dengan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sosialnya.
7. Kualitas demokrasi; nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum
8. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis serba instan dan mengabaikan proses yang berkualitas

Dari kebijakan nasional tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Jepara merumuskan beberapa program prioritas pada tahun 2023 antara lain :

1. Gerakan Revolusi Mental
2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan
3. Sosialisasi dan Penyuluhan Perda P4GN
4. Gerakan Kemitraan Bersama Organisasi Masyarakat Sipil dan Pergurungan Tinggi Dalam Rangka mensukseskan Pemilu 2024



5. Forum Komunikasi Sosial Politik Dalam Rangka Cipta Kondisi Wilayah
6. Penguatan Peran dan Fungsi Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah Jawa Tengah
7. Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama
8. Penguatan Iklan Layanan Pendidikan Politik
9. Pembinaan Karya Seni dan Budaya Sebagai Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
10. Pembentukan Tim Pemantauan Pemilu Dalam Rangka Sukses Pemilu 2024
11. Penguatan Peran Toga, Tomas dan Ormas dalam menjaga kerukunan umat beragama
12. Penguatan Partisipasi Politik dan peningkatan peran partai politik

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan sasaran Renja PD tahun 2023 ini adalah merupakan tahun pertama pasca selesainya periode RPJMD tahun 2017 - 2022 dan belum ditetapkan RPJMD untuk periode selanjutnya, karena tahun ini belum di tetapkan RPJMD, maka penyusunan RKPD diatur dalam pasal 147 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kab/kota Penyusunan RKPD berpedoman arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kab/Kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten /Kota dengan pembangunan daerah Provinsi.

Berdasarkan inti kajian dimaksud, maka penyusunan RKPD kabupaten Jepara Tahun 2023 berpedoman pada RENSTRA PD 2023 - 2026 dan sasaran pokok RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023- 2026 serta RPJMD Provinsi Jateng Tahun 2018- 2023 agar tercapai keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah Provinsi Jateng, Dalam mewujudkan tujuan Pembangunan tersebut, maka tema Pembangunan yang diusung Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah **“Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat “** keselarasan berdasarkan RKPD 2023 – 2026 Kabupaten Jepara bahwa Kesbangpol Jepara merujuk pada arah kebijakan prioritas pembangunan pada point 2 , yaitu Penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat, Dengan berlandaskan point 2 yang telah ditetapkan, dalam rangka untuk mendukung arah pembangunan pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara merumuskan Program dan Kegiatan prioritas.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2023 merupakan awal Renstra 2023 s.d 2026 yang menjadi



pertimbangan utama dalam menyusun program dan kegiatan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kegiatan tersebut adalah:

1. Mendukung RPD Rencana Pembangunan Daerah ( 2023 -2026 )
2. Menjaga kondusifitas daerah
3. Mengoptimalkan struktur yang ada dengan fungsi yang harus dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sehingga pendekatan yang dilakukan harus lebih dinamis, salah satunya adalah untuk mendukung pelaksanaan Suksesi Pemilu 2024

Jumlah program yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 adalah sebanyak 6 (enam) program dengan 12 (duabelas) kegiatan dan 39 ( tiga puluh sembilan ) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

- 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing ,Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara ,Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik Di Daerah

fokus pada kegiatan antara lain Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah dan Monitoring dan Pemantauan Warga Negara Asing

- 2) Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini,kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing ,kewaspadaan perbatasan antar negara ,Fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah

Focus pada kegiatan Sosialisasi Undang undang nomor 7 tentang penanganan konflik sosial,Penunjang Penanganan Gangguan Keamanan, dan Fasilitas Tim Wadinda

- 3). Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Focus pada Fasilitas Forkopimda dan Forkopimcam

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan , bela negara, karekter kebangsaan ,pembauran kebangsaan ,bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

Focus pada Kegiatan antara lain Bina Bangsa Safari Kebangsaan , Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Penyelenggaraan PPBN

3. Program Pemeberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
  - 1). Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas ,pengawasan ormas dan ormas asing di daerah .

Focus pada kegiatan antara lain pemutakhiran data ormas, fasiltasi kegiatan ormas , pengiriman peserta pelatihan ormas dan Pembinaan Ormas
  - 2). Sub Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  
Focus pada kegiatan antara lain Monitoring dan Pemantauan kegiatan ormas
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial, dan Budaya
  - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengahayat Kepercayaan di Daerah  
Focus pada kegiatan diantaranya : Sosialisasi P4GN, Pelatihan relawan, Pembentukan Desa Anaba
5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
  - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik ,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi ,Fasiltasi Kelembagaan Pemerintahan ,Perwakilan dan Partai Politik ,Pem,ilihan Umum /Pemilhan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Darah  
Focus Kegiatan antara lain Pendidikan Politk bagi masyarakat Sosialisasi Pelatihan LPJ Banpol Kegiatan Monitoring , Ealuasi Bantuan Parpol , Bantuan Keuangan Parpol , Iklan Layanan Sukses Pemilu 2024, dan Fasilitasi Tim Pemantauan Dinamika Politk Sukses Pemilu 2024

6 . Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA -SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Adminitrasi Keuangan
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /semesteran SKPD
3. Kegiatan Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
  - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
5. Kegiatan Adminitrasi Umum.
  - a. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Bahan Material
  - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
  - a. Pengadaan Mebel
  - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kenadaraan Dinas Jabatan
    - a. Pemeliharaan Mebel
    - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - c. Pemeliharaan /Rehabilotasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**Tabel T - C.33.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2023**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Jepara**

Perangkat Daerah : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara**

lembar ..... dari.....

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi Output Kegiatan	Targ et Capa ian Kiner ja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaia n Kinerja	Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100%	3,081,91 5,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	3,141,56 6,000
8 1 1 2	Perencanaan, Penggangan , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengangan dan evaluasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	10 doku men	29,900,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 doku men	65,000,0 00
8 0 0 2. 0 1 1 01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	1 Doku men	10,000,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Doku men	20,000,0 00
8 0 0 2. 0 1 1 01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Jepara, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	39 Doku men	480,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		39 Doku men	500,000



8	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	500,000
8	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan DP A-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 Dokumen	480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	37 Dokumen	500,000
8	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	3 Dokumen	480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	500,000
8	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	13 Laporan	480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Laporan	500,000
8	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	42,500,000
8	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 laporan	2,488,892,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 laporan	2,500,902,000
8	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Orang/bul	2,387,902,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Orang/bul	2,387,902,000
8	0	0	2.	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	112,000,000
8	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1,000,000

8	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada PD			720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0%	744,000
8	0	0	2.	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	6 Laporan	720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	744,000
8	1	1	2,		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan		1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0%	1,000,000
8	0	0	2.	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	2 Unit	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	1,000,000
8	1	1	2,		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan		138,993,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0%	156,870,000
8	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	2,272,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	2,272,000
8	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	6,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	7,000,000
8	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	7,000,000
8	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	10,000,000
8	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	10,114,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	10,121,810
8	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	15,000,000
8	0	0	2.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	2,976,190

8	0	0	2.	0	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jepara, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	13 Lapor an	86,317,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	13 Lapor an	102,500, 000
8	1	1	2, 1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumentasi laporan pengadaan barang milik daerah yang tersedia	Kab. Jepara, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	14 Unit	30,360,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	14 Unit	25,000,0 00
8	0	0	2.	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Jepara, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	12 Unit	20,560,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12 Unit	0
8	0	0	2.	0	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	2 Unit	9,800,00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2 Unit	25,000,0 00
8	1	1	2, 1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersdiakan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan		341,750, 000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0%	341,750, 000
8	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	8 Lapor an	1,000,00 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	8 Lapor an	1,000,00 0
8	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	4 Lapor an	61,500,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4 Lapor an	61,500,0 00
8	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	12 Lapor an	279,250, 000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12 Lapor an	279,250, 000
8	1	1	2, 1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD yang tersedia	Kab. Jepara, Jepara, Demaan		50,300,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0%	50,300,0 00
8	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	17 Unit	37,500,0 00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	17 Unit	37,500,0 00
8	0	0	2.	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	1 Unit	500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Unit	500,000



8	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	10 Unit	6,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	6,700,000
8	0	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	4 Unit	5,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	5,600,000
8	1	2			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	0,17 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0,17 %	100,000,000
8	1	2	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	3 laporan	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 laporan	100,000,000
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2085 Orang	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2085 Orang	100,000,000
8	1	3			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.09 %	21,871,669,190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0.09 %	1,884,669,190
8	0	0	2.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 laporan	21,871,669,190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 laporan	1,884,669,190



8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.09 %	21,871,69,190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0.09 %	1,884,669,190
8	1	4			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	1,845,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 %	1,000,000
8	1	4	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan	1,845,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 laporan	1,000,000
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	1,844,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	0
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 %	1,000,000
8	1	5			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Cakupan penyuluhan P4GN pada pelajar	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	104,673,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 %	104,750,000

8	1	5	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 laporan	104,673,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 laporan	104,750,000
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4500 Orang	104,673,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4500 Orang	104,750,000
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Keberhasilan dalam pencegahan konflik	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	berhasil opini	211,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	berhasil opini	195,000,000
8	1	6	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 laporan	211,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 laporan	195,000,000
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Orang	58,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70 Orang	108,000,000

8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	24 Laporan	37,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 Laporan	37,000,000
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	116,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	50,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>27,189,557,190</b>			<b>5,426,985,190</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara hanya melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik,. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Badan Kesbangpol Kabupaten Jepara mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Jepara memiliki rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023, sebagai berikut

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Straregis PD Tahun 2023 yang mengacu pada RPD Kabupaten Jepara. Penyusunan Renja Perangkat Daerah saat ini sudah mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun untuk kurun waktu 2023 – 2026 dan juga mengacu pada Permendagri No 90 Tahun 2019 untuk penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga prosesnya sudah sesuai dengan tatakala penyusunan rencana kegiatan.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara memuat Program, kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara. Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang merupakan hasil analisis sebagai pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023

